



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**SEKRETARIAT DPRD KABUPTEN MALINAU
TAHUN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam LAKIP. Tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada ini intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

LAKIP ini selain dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau juga dimaksudkan untuk dapat memperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah dimasa mendatang.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2012. Selanjutnya dapat diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Pembentukan

Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2000 tanggal 19 September 2000. Aturan pokok pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang meliputi pelaksanaan informasi keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan, dan untuk melaksanakan tugas pokok ini Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan;
2. Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan Pimpinan Dewan;
3. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan dan perawatannya;
4. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan;
5. Mengatur penerimaan tamu-tamu Dewan dan atau delegasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada Dewan serta kegiatan Pimpinan Dewan;
6. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan;
7. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam Sekretariat DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD;

3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Pengkajian dan Pelayanan Informasi meliputi :
 - a. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengelolaan Data
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi
 - c. Sub Bagian Protokol
3. Persidangan dan Risalah meliputi :
 - a. Sub Bagian Persidangan
 - b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - c. Sub Bagian Risalah
4. Umum dan Kepegawaian meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Kearsipan
5. Keuangan meliputi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran Dewan dan Setwan
 - b. Sub Bagian Pelaksana Anggaran Dewan dan Setwan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Dewan dan Setwan
6. Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau per 31 Desember 2012 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 75 orang yang terdiri dari 15 orang pejabat struktural dan 59 orang staf non struktural.

Jumlah personel yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau menempati tugas pada bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi berjumlah 20 (delapan belas) orang, Bagian Persidangan dan Risalah berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 26 (dua puluh delapan) orang, bagian Keuangan berjumlah 11 (sebelas) orang.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, belum mencukupi kebutuhan karena dari segi keahlian teknis perencanaan pegawai yang ada masih belum memadai.

5. Sarana Dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa : kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan bagi stakeholders yang diberikan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini menguraikan tentang penerapan system Akuntabilitas Kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, , gambaran umum organisasi, dan sistematika penyajian LAKIP tahun 2012.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Bab ini menggambarkan tentang aspek Rencana Stratejik dan Kinerja meliputi Rencana Strategis , rencana Kinerja tahun 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi : Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Malinau ; Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik, dan Analisa atas akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

Dalam rangka memfasilitasi dan mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh dan selalu merujuk pada pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Malinau dengan VISI yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai “

Sesuai dengan Visi Kabupaten Malinau tahun 2012 - 2016 sebagaimana tersebut diatas dan salah satu misi Kab. Malinau : **“Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).”** maka Visi dan Misi Sekretariat DPRD Malinau disusun untuk dapat mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi ke delapan Kabupaten Malinau tersebut. Mengacu pada Visi Kabupaten Malinau diatas, maka Sekretariat DPRD Malinau menetapkan Visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Berkualitas dan Profesional Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. “

Untuk mewujudkan cita-cita dari Visi tersebut diatas, maka Sekretariat DPRD Malinau menetapkan **Misi sbb** :

- Memberikan pelayanan administrasi yang prima dalam rangka menunjang kegiatan DPRD
- Meningkatkan produktivitas, kecerdasan, kesehatan, kedisiplinan dan pengembangan inovasi Sekretariat DPRD
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi misi Sekretariat DPRD yang bermuara pada visi misi Kabupaten Malinau, Sekretariat DPRD perlu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan utama Sekretariat DPRD adalah mendukung terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan pemerintah Kabupaten Malinau yang bersih, efektif, serta efisien yang bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan memberikan pelayanan administrasi yang berkualitas dan profesional kepada pimpinan dan anggota DPRD sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Meningkatkan kemampuan aparatur sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik
3. Memfasilitasi masyarakat/organisasi masyarakat dalam berkonsultasi atau menyalurkan aspirasi kepada Anggota DPRD.

Tujuan tersebut diatas mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka merealisasikan misi, sedangkan sasaran adalah hasil yang akan terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran-sasaran stratejik dari tujuan tersebut yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kab. Malinau adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Terlatihnya SDM yang memiliki kopentensi sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik

3. Terpenuhinya sarana prasarana kantor dan aparatur
4. Terakomodirnya dan terlaksananya konsultasi atau penyaluran aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD.

3. Kebijakan

Kebijakan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran . Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan Sekretariat DPRD Malinau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Pemantapan Perencanaan administrasi yang komprehensif dan aspiratif untuk mendukung kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peningkatan komunikasi dan koordinasi perencanaan administrasi yang intensif dan berkelanjutan;
3. Penerapan sistem pengendalian program dan kegiatan perencanaan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Penerapan juklak/juknis/acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
5. Peningkatan kapasitas SDM dan Aparatur Perencanaan administrasi;
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi;

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

1. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2012 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima kepada pimpinan dan anggota DPRD	1. Terpenuhinya kebutuhan/kelengkapan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100
		2. Terlaksanannya rapat-rapat DPRD	%	100
2	Terlatihnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik	1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi dll	Orang	75
3	Terpenuhinya sarana prasarana kantor dan aparatur	1. Tersedia sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas DPRD	%	100
4	Terakomodirnya /terlaksananya konsultasi dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD	1. Jumlah Raperda yg ditetapkan menjadi Perda	Perda	30
		2. Terjaringnya aspirasi masyarakat melalui dialog/hearing	%	100
		3. Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD	%	100

2. Program dan Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran dan program Sekretariat DPRD Malinau tahun 2012. Kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Malinau yang terinci dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan 2012 (terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP Sekretariat DPRD Malinau. Pada tahun 2012 Sekretariat DPRD telah menetapkan 3 program untuk dilaksanakan.

Program Tahun 2012 :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Pengadaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2012:

Penunjang Administrasi Pemerintah

1. Penunjang Administrasi Pemerintah
2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
3. Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Persidangan
4. Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Penyediaan Jasa Administrasi Bagian Keuangan
6. Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi
7. Operasional Sekretariat DPRD
8. Pengadaan Mesin Tempel 200 PK
9. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Legal Drafting
10. Kegiatan RESES
11. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
12. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
13. Pembinaan Fraksi-fraksi DPRD

3. Anggaran Tahun 2012

Belanja Tidak Langsung

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	4.918.874.585
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.393.402.231
	Jumlah	8.312.276.816

Belanja langsung

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Penunjang Administrasi Pemerintah	227.302.500
2	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	550.000.000
3	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Persidangan	1.026.270.000
4	Penunjang administrasi Pemerintah Bagian Umum dan Kepegawaian	20.260.940.000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	762.980.000
6	Operasional Sekretariat DPRD	678.980.000
7	Penunjang administrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi	1.611.628.000
8	Pengadaan Mesin Tempel 200 PK	650.000.000
9	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Legal Drafting	4.115.000.000
10	Kegiatan RESES	3.879.120.000
11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2.989.380.000
12	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000.000
13	Pembinaan Fraksi-fraksi DPRD	600.000.000
	Jumlah	39.851.600.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
3. Keuangan;

Penjelasan lebih lanjut untuk keempat aspek tersebut, adalah sebagai berikut:

A. PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD MALINAU

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcomes*). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa secara umum Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Sekretariat DPRD dilihat dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 % dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun ada beberapa kegiatan yang tingkat pencapaiannya tidak memenuhi target yaitu kegiatan Penunjang administrasi pemerintahan bagian umum dan kepegawaian, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD serta kegiatan pembahasan raperda /Legal drafting. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel II sebagaimana terlampir.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK SEKRETARIAT DPRD MALINAU

Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran pertama : Terwujudnya pelayanan administrasi yang prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

- Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1. Terpenuhinya kebutuhan/kelengkapan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100
2. Terlaksanannya rapat-rapat DPRD	%	100	100	100

Untuk menunjang keberhasilan sasaran ini sangat didukung oleh kelancaran pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Kejadiannya yang dilaksanakan adalah penunjang administrasi pemerintah bagian keuangan, bagian pengkajian dan pelayanan informasi, bagian persidangan,operasional sekretariat DPRD dan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD. Capaian indikator sasaran pelayanan administrasi yang prima kepada pimpinan dan anggota DPRD mencapai 100 %.

- Sasaran Kedua : Terlatihnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1(satu) indikator kinerja.

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi dll	orang	75	75	100

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan Pendidikan/pelatihan pegawai Sekretariat DPRD. Capaian indikator sasaran ini mencapai 100 %.

- Sasaran Ketiga : Terpenuhinya sarana prasarana kantor dan aparatur

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1. Tersedianya sarana prasarana untuk kelancaran tugas DPRD	orang	100	85	85

Kegiatan yang dilaksanakan untuk sasaran ketiga adalah kegiatan pengadaan mesin tempel dan penunjang administrasi pemerintahan bagian umum dan kepegawaian. Capaian kinerja pada sasaran ketiga ini sekitar 85 % karena ada beberapa sub kegiatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu belanja modal sebesar 720.48.2.000,- yang meliputi pengadaan AC duduk, pemasangan internet / website DPRD, pengadaan pembangunan konstruksi garasi mobil.

- Sasaran Keempat : Terakomodirnya /terlaksananya konsultasi dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1. Jumlah Raperda yg ditetapkan menjadi Perda	Perda	30	14	46,67
2. Terjaringnya aspirasi masyarakat melalui dialog/hearing	%	100	100	100
3. Terlaksananya fungsi legislasi dan pengawasan DPRD	%	100	85	85

Tingkat Keberhasilan dari sasaran ini dilihat dari 3 indikator sasaran, Realisasi dari target yang ditetapkan pada indikator kedua melalui kegiatan reses dapat dicapai 100 % sedangkan 2 dari indikator yang ditetapkan belum mencapai targetnya seperti kegiatan pembahasan raperda untuk tahun 2012 belum memenuhi target, dari 30 raperda yang direncanakan untuk dibahas terealisasi hanya 17 raperda yang diusulkan dan dibahas, dari 17 usulan raperda diantaranya 14 ditetapkan menjadi Perda dan 3 raperda ditangguhkan, tahap awal pembahasan 3 raperda tersebut sudah diselesaikan hanya menunggu finalisasi pembahasan yang akan dilaksanakan tahun 2013. Indikator ketiga dari sasaran ini khususnya fungsi legislasi juga belum dapat dilaksanakan secara optimal, kunjungan kerja study banding anggota DPRD keluar daerah untuk mendapatkan referensi yang luas dalam merumuskan kebijakan publik terkendala dengan rapat-rapat dan padatnya jadwal kerja

anggota DPRD dalam melaksanakan tugas lain yang diprioritaskan, sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD turun ke lapangan melakukan evaluasi pembangunan dan inspeksi mendadak (sidak) , kegiatan ini dapat berjalan sesuai rencana.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Malinau Tahun 2012 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012 dengan alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2012 sebesar Rp. 8.312.276.816 ,- dengan realisasinya sebesar Rp. 7.590.595.527,- atau 91,32 %. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung program dan kegiatan sebesar Rp. 39.851.600.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 33.322.978.045,- atau 83,62 %.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut ini :

1) Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	4.918.874.585	4.400.681.121	89,47
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	3.393.402.231	3.189.914.406	94,00
	Jumlah	8.312.276.816	7.590.595.527	91,32

2) Belanja langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penunjang Administrasi Pemerintah	227.302.500	141.170.000	62,11
2	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	550.000.000	506.438.280	92,08
3	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Persidangan	1.026.270.000	971.455.000	94,66
4	Penunjang administrasi Pemerintah Bagian Umum dan Kepegawaian	20.260.940.000	18.265.508.875	90,15
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	762.980.000	747.473.200	97,97
6	Operasional Sekretariat DPRD	678.980.000	550.198.000	81,03
7	Penunjang administrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi	1.611.628.000	1.359.158.250	84,33
8	Pengadaan Mesin Tempel 200 PK	650.000.000	450.693.440	69,34
9	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah / Legal Drafting	4.115.000.000	1.615.395.000	39,26
10	Kegiatan RESES	3.879.120.000	3.879.120.000	100,00
11	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2.989.380.000	1.907.640.000	63,81
12	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000.000	2.392.800.000	95,71
13	Pembinaan Fraksi-fraksi DPRD	600.000.000	535.928.000	89,32
	Jumlah	39.851.600.500	33.322.978.045	83,62

3) Pencapaian Kinerja Keuangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	8.312.276.816	7.590.595.527	721.681.289
2	Belanja Langsung	39.851.600.500	33.322.978.045	6.528.622.455
Jumlah		48.163.877.316	40.913.573.572	7.250.303.744
Pencapaian		84,95%		

Realisasi Anggaran Belanja pada Sekretariat DPRD Malinau terserap 84,95 %, dengan sisa dana pada Belanja Tidak Langsung Rp. 721.681.289,- dan pada Belanja Langsung sisa dana Rp. 6.528.622.455. Pada Belanja Tidak Langsung sisa dana tersebut sebagian besar adalah dana yang dianggarkan untuk bantuan kedukaan / wafat dalam menjalankan tugas, Jasa pengabdian, juga sisa dari perencanaan maksimal untuk tunjangan keluarga (anak, beras dll) yang jumlah input orangnya dibawah target rencana, sedangkan sisa dana belanja langsung disebabkan adanya selisih tender/penawaran pelelangan dengan pagu anggaran dan adanya beberapa kegiatan yang targetnya belum terpenuhi. Pada kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah /Legal Drafting tidak seluruh target yang ditentukan dapat terealisasi, dari 30 raperda yang dianggarkan untuk dibahas terealisasi hanya 17 raperda yang diusulkan dan dibahas, sehingga dana yang terealisasi hanya untuk pembahasan 17 raperda. Selain itu dana yang dianggarkan untuk konsultasi publik dan sosialisasi perda yang telah ditetapkan kepada masyarakat kurang terserap.

Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD tidak seluruhnya terlaksana dikarenakan padatnya jadwal kerja anggota DPRD, banyaknya permasalahan daerah yang dirapatkan, selain itu pimpinan dan anggota DPRD juga melakukan usaha penghematan dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan kunjungan kerja study banding keluar daerah.

Pada Kegiatan Penunjang administrasi pemerintahan bagian umum dan kepegawaian dilakukan efisiensi belanja listrik,air, telepon dan faximili sebesar Rp. 459.507.175,-, efisiensi belanja pegawai sebesar Rp. 264.729.250,- dan ada beberapa sub kegiatan belanja modal yang tidak terlaksana pada tahun 2012.

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2012 secara umum dikategorikan berhasil dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban LAKIP Sekretariat DPRD Malinau ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau, dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capain kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Malinau telah berhasil dengan kategori cukup memuaskan (Total capaian sasaran Sekretariat DPRD Malinau 88,10 %) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar .84,95 % . Walaupun Sekretariat DPRD Malinau dalam mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia ,belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal terkait tugas dan fungsi, sedangkan lingkup eksternal mencakup sering adanya perubahan peraturan perundangan tentang protokoler DPRD, sehingga dapat dikatakan bahwa angka tersebut diatas cukup memberikan kebanggaan pada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak dan dari manajemen Sekretariat DPRD itu sendiri. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan agar setiap kepentingan masyarakat dapat terus terakomodasi dalam APBD Kabupaten Malinau setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan dengan form PPK dan PPS dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2012, secara umum SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Malinau telah berhasil mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis yang direncanakan. Rincian tingkat capainya sasaran, tersebut diilustrasikan dalam table pada lampiran.

Kebijakan publik harus dapat referensi yang luas. UU buat jangka panjang. Kalau UU dibuat asal, berbahaya buat bangsa ini.

hasil kerja DPR tidak bisa langsung dirasakan publik. Kebijakan yang dibuat bersama pemerintah dan berbagai pihak, kata dia, akan dirasakan masyarakat ketika UU diterapkan.

. Sosialisasi terhadap perda yang telah ditetapkan kurang.....

Padahal idealnya pengawasan dapat dilakukan delapan kali dalam sebulan, atau dua kali dalam sepekan untuk turun ke lapangan guna inspeksi mendadak (Sidak).

Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai targetnya

melakukan kunjungan keluar daerah dengan berbagai jenis kegiatan, di antaranya Pansus maupun studi banding. T

dari 30 raperda yang dianggarkan untuk dibahas terealisasi hanya 17 raperda dengan 1 raperda berasal dari hak inisiatif Dewan, dari 17 raperda yang diusulkan dan dibahas tersebut 14 raperda ditetapkan menjadi Perda.

DPRD sudah lakukan/ Luar biasa penghem

Indikator ketiga dari sasaran ini khususnya fungsi pengawasan juga belum dapat dilaksanakan secara optimal, kunjungan kerja anggota DPRD untuk turun ke lapangan melakukan evaluasi pembangunan dan inspeksi mendadak (sidak) yang idealnya dapat dilakukan delapan kali dalam sebulan, atau dua kali dalam sepekan terkendala dengan rapat-rapat dan padatnya jadwal kerja angota DPRD dalam melaksanakan tugas lain yang diprioritaskan.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	3	4	5		8
1	Anggota DPRD dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari tetap sehat	Penyediaan Jasa Jaminana Kesehatan Anggota DPRD	1 Tahun	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan	525,900,000
2	Untuk kelancaran Operasional Kedinasan	Terlaksananya layanan perpanjangan STNK,KIR dan Service Kendaraan Dinas	1 Tahun	Pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,155,365,000
3	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa Cleaning servise Kantor	1 Tahun	Penyediaan jasa kebersihan kantor	722,400,000
4	Terlaksananya Penunjang Adminstrasi Perkantoran	Penunjang Adminstrasi Perkantoran	1 Tahun	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	268,830,000
5	Untuk kelancaran Operasional Kedinasan	Terlaksananya layanan bahan bakar minyak kendaraan roda 2,4 dan speed boat	1 Tahun	Penyediaan bahan Logistik kantor	2,415,970,000
6	Tersedianya Makan dan Minuman rapat/ tamu DPRD	Penyediaan Makan dan Minuman rapat/ tamu DPRD	1 Tahun	Penyediaan Makan dan Minuman	1,215,679,100
7	terlaksananya Kegiatan di bagian Persidangan	Pelaksanaan kegiatan di Bagian persidangan	1 Tahun	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian persidangan	1,420,200,000
8	terlaksananya Kegiatan di bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan kegiatan di Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Tahun	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Umum dan Kepegawaian	10,844,950,900
9	terlaksananya Kegiatan di bagian Keuangan	Pelaksanaan kegiatan di Bagian Keuangan	1 Tahun	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Keuangan	1,200,250,000
10	Sebagai Penunjang Operasional Kegiatan Dewan	Pelaksanaan Operasional Sekretariat DPRD	1 Tahun	Operasional Sekretariat DPRD	600,000,000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	3	4	5		8
11	terlaksananya Kegiatan di bagian Pengkajian dan Pel Informasi	Pelaksanaan kegiatan di Bagian Pengkajian dan Pel Informasi	1 Tahun	Penunjang Administrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pel Informasi	1,649,650,000
12	Terpeliharanya Kebersihan dan Keindahan taman Kantor	Penyediaan jasa Cleaning servise taman	1 Tahun	Penyediaan jasa Kebersihan Taman kantor	707,300,000
13	Sebagai Penunjang Perlengkapan/Meubelair kantor dan Unsur Pimpinan	Pengadaan Perlengkapan/Meubelair kantor dan Unsur Pimpinan	1 Tahun	Pengadaan Perlengkapan/Meubelair kantor dan Unsur Pimpinan DPRD	500,000,000
14	Sebagai layanan jasa mekanik/ Engenering Kantor	Penunjang layanan listrik kantor		Penyediaan jasa mekanik/Engenering Kantor	273,350,000
15	Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	200,000,000
16	Tersedianya peralatan dapur Rumah Jabatan / Dinas	Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	3 unit	Pemeliharaan rutin /berkala Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	600,000,000
17	Sebagai penunjang sarana dan prasarana Fraksi Golkar	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Golkar	1 Tahun	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Golkar	167,625,000
18	Sebagai penunjang sarana dan prasarana Fraksi Pelangi Nusantara	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Pelangi Nusantara	1 Tahun	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Pelangi Nusantara	167,625,000
19	Sebagai penunjang sarana dan prasarana Fraksi Intimung	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Intimung	1 Tahun	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi Intimung	167,625,000
20	Sebagai penunjang sarana dan prasarana Fraksi PDIP	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi PDIP	1 Tahun	Penyediaan sarana dan prasarana Fraksi PDIP	167,625,000
21	Terlaksannya Pembahasan Raperda/Legal drafting bersama Eksekutif ,Legislatif,Lembaga Hukum dan Masyarakat	Pembahasan Raperda/Legal drafting bersama Eksekutif ,Legislatif,Lembaga Hukum dan Masyarakat	10 Raperda	Pembahasan Raperda/Legal drafting	4,300,000,000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	3	4	5		8
22	Menampung/menyerap berbagai aspirasi masyarakat	Kunjungan keberbagai Kecamatan dan Desa	1 Tahun	Reses	3,835,200,000
23	Evaluasi hasil-hasil pembangunan dan study banding	Kunjungan keberbagai kecamatan /Kabupaten dan Kota	20 orang	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3,532,200,000
24	Peningkatan SDM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kunjungan keberbagai Kabupaten dan Kota	1 Tahun	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3,733,270,000
25	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD	Kunjungan keberbagai kecamatan lembaga masyarakat dan Pemerintah	20 orang	Menampung/menyerap berbagai aspirasi Konsetuen	1,548,200,000
26	Penyampaian melalui media Kegiatan yang dilakukan Pimpinan dan Anggota	Tersedianya berbagai macam aktifitas Pimpinan dan Anggoat DPRD yang terangkum dalam Media Publikasi Parlementaria	1 Tahun	Publikasi Parlementaria DPRD	501,960,000
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014					Rp 42,421,175,000.00

Malinau, 18 Maret 2014

BUPATI MALINAU

SEKRETARIS DPRD KAB.MALINAU

DR.YANSEN TP,M.Si

MAKSON.S.Sos,MM
NIP. 19560710 1998 03 1 005

PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN

TAHUN 2013

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALINAU

Form PPS

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	5		5	6
1	Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / operasional	1 Jumlah kendaraan yang mendapat layanan servise 1. Mobil roda empat 29 Unit 2. Motor roda dua 16 Unit	 29 16	 29 16	 100 100	
2	kebersihan kantor	2 Terlaksananya kebersihan Kantor	1 paket	1 paket	100%	
3	barang cetak dan penggandaan	3 Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	360 buku	24 buku	6%	
4	buku bacaan peraturan perundang undangan	4 Jumlah buku bacaan peraturan perundang undangan	106	106	100	
5	Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang digunakan Bensi Muri Bensin campur Solar	 45.700 liter 49.950 liter 49.800 liter	 45.700 liter 49.950 liter 49.800 liter	 100 % 100 % 100 %	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	5		5	6
	Makan dan Minum	Jumlah Makan dan minuman Rapat				
		Rapat Paripurna	21	21	100 %	
		Rapat Paripurna/ Istimewa	3	3	100 %	
		Rapat Gabungan Komsi-komisi	4	4	100 %	
		Rapat Badan Musyawarah	4	4	100 %	
		Rapat Badan Anggaran	5	5	100 %	
		Rapat Panitia Khusus	2	2	100 %	
		Rapat Ligislasi	2	2	100 %	
		Rapat Badan Kehormatan	2	2	100 %	
	Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah pelayanan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	20 orang	20 orang	100%	
	Penunjang Adminitrasi Pemerintah Bagian Persidangan	Terlaksananya administrasi penunjang Bagian Persidangan				
		Penjilidan Risalah	150 buku	151 buku	50%	
		Penjilidan Surat Keputusan	80 buku	40 buku	50%	
		Penjilidan Peraturan Daerah	80 buku	40 buku	50%	
		Penjilidan Laporan Tahunan	80 buku	40 buku	50%	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	5		5	6
	Administrasi Pemerintahan Bagian Umum & Kepegawaian	Terlaksananya administrasi penunjang Bagian Umum dan Kepegawaian	100	100	100%	
	Jasa Administrasi Bagian Keuangan	Terlaksananya administrasi penunjang Bagian Keuangan	100	100	100%	
	Operasional Sekretariat DPRD	Terlaksananya Operasional (OPS) Sekretariat DPRD	100	100	100%	
	Penunjang Adminitrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pely Informasi	Terlaksananya Penunjang Adminitrasi Pemerintah Bagian Pengkajian dan Pely Informasi	100	100	100%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Taman Kantor	Terlaksananya Kebersihan di Lingkungan Taman kantor DPRD Kabupaten Malinau	100	100	100%	
	Perlengkapan/Meubeler Kantor dan Unsur Pimpinan	Tersedianya perlengkapan/ meubeler kantor dan unsur Pimpinan	3 set	3 set	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya secara / berkalai Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/ bekala peralatan Kantor	1 paket	1 paket	100	
	Sarana dan Prasarana Fraksi Golkar	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Fraksi Golkar	1 paket	1 paket	100	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	5		5	6
	Sarana dan Prasarana Fraksi PDI Perjuangan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Fraksi PDI Perjuangan	1 paket	1 paket	100	
	Sarana dan Prasarana Fraksi Pelangi Nusantara	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Fraksi Pelangi Nusantara	1 paket	1 paket	100	
	Sarana dan Prasarana Fraksi Intimung	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Fraksi Intimung	1 paket	1 paket	100	
	Pintu Gerbang Kantor	Terlaksananya Pembangunan Pintu Gerbang Kantor	2 unit	2 unit	100%	
	Gudang Kantor	Terlaksananya Pembangunan gudang Kantor	1 unt	1 unit	100%	
	Garasi Bus	Terlaksananya Pembangunan Garasi Bus	1 unt	1 unit	100%	
	Peralatan Rumah Dinas Jabatan DPRD	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas Jabatan untuk Unsur Pimpinan	1 [paket	1 paket	100%	
	Perlengkapan Rumah Dinas Jabatan DPRD	Perlengkapan Rumah inas Jabatan DPRD	3 unit	3 unit	100%	
	Speed Boat dan Mesin	Speed Boat dan Mesin	2 jenis	2 jenis	100%	
	Pembahasan Raperda/ Legal Drafting	Penetapan Raperda	30	15	50%	
	Reses	Terlaksananya Reses	3 kali	3 kail	100%	

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1	2	3	5		5	6
	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	9 kali	8 kali	88%	
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	8 kali	8 kali	100%	
	Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD	3 kali	3 kali	100%	

SEKRETARIS DPRD KAB.MALINAU

MAKSON.S.Sos,MM
NIP. 19560710 1998 03 1 005